

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Nasril. 2015. Rencana Kawasan Wisata di Pesisir Meuraxa Menggunakan Konsep *Recreational Waterfront*. Yogyakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, UGM.
- Azzahraa, Fatimah. 2014. Peremajaan Kawasan Tepian Sungai Winongo Kampung Badran yang Berwawasan Kota Hijau (*Green City*), Yogyakarta: Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, UGM.
- Benedict, M.A., Allen, W.L. and McMahon, E. T., 2004, Advancing Strategic Conservation In The Commonwealth Of Virginia Using a Green Infrastructure Approach to Coserving and Managing the Commonwealth's Natural Areas, Working Landscapes, Open Space, and Other Critical Resources.
- Breen, Ann & Dick Rigby. 1994. Waterfront, Cities Reclaim Their Edge. New York: Mc. Graw Hill.
- Dirjen Tata Ruang Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum.
- Djunaedi, Ahmad. 2012. Proses Perencanaan Wilayah dan Kota. Yogyakarta: UGM Press.
- Echols, J. M., dan Shadily, H. 2003. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.
- Pemerintah Daerah Kota Semarang. (2009). Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tentang Bangunan Gedung. Semarang: Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1985). Undang-undang No. 16 Tentang Rumah Susun.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-undang No. 4 Tentang Perumahan dan Permukiman. Jakarta: Sekretariat Negara Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Standar Nasional Indonesia No. 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. Jakarta: BSNI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Standar Nasional Indonesia No. 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Jakarta: BSNI.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Sekretariat Negara Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengamanan Pantai. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten Kota. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Post, Jan C. dan Lundin, Carl G. Editors. 1996. Guidelines for Integrated Coastal Zone Management. Washington, D. C: World Bank.
- Samadikun, Budi Prasetyo. 2014. Pemodelan Pengelolaan Infrastruktur Hijau Kasus: Kawasan Tembalang Semarang. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sasaki. (2012). Thu Thiem, Ho Chi Minh City, Vietnam (1:2000 Master Plan Adjustment, 2012).
- Sastrawati, Isfa, 2003. Prinsip Perencanaan Tepi Air (Kasus: Kawasan Tanjung Bunga). Bandung: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB VOL. 14 No. 3/Desember 2003 Hal 95-117.
- Setiawan, Bakti dan Dwita Hadi R. 2008, Kota Ekologis (Panduan Untuk Mewujudkan Kota Komunitas dan Bangunan Ramah Lingkungan). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan. Yogyakarta.
- Sorensen, Jens C. and McCreary, Scott T. 1990. Institutional Arrangements for Managing Coastal Resources and Environments National Park Service, U. S. Departement of The Interior.

Widyamurdani, Stefanus. 1995. Penataan Kawasan Tepian Air (Waterfront Development di Kawasan Benteng Kuto Besak di Palembang). Yogyakarta: Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, UGM.